

ANALISIS POTENSI PEREKONOMIAN KOTA BANJARBARU

Chairul Sa'roni ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Ringkasan

Untuk mengembangkan potensi sektor-sektor strategis di Kota Banjarbaru dalam pengembangan potensi daerah yang lebih luas yang akhirnya bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan PAD, ditengah keterbatasan SDA namun letak geografis yang strategis Banjarbaru hingga potensi-potensi yang dimiliki harus benar-benar dimanfaatkan.

Kata Kunci : *potensi daerah, sumberdaya ekonomi*

1. PENDAHULUAN

Menumbuh kembangkan sektor perekonomian, hal ini menjadi kebijakan daerah yang sejalan dengan perencanaan pembangunan. Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan prioritas dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan yang direalisasikan sesuai arah kebijakan dan pembangunan yang dijalankan secara berkelanjutan. Diantara prioritas yang telah ditetapkan tersebut adalah mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha serta pengembangan sarana prasarana strategis untuk menunjang aktivitas perekonomian yang berdampak pada peningkatan pesona dan daya tarik daerah.

Potensi yang dimiliki Banjarbaru tergambar pula dari berbagai kesempatan berusaha yang tercipta dan berpeluang unggul. Selain itu, ditengah keterbatasan SDA namun letak geografis yang strategis Banjarbaru cocok dijadikan pusat jasa perkotaan khususnya pendidikan.

Ditengah beragamnya potensi yang dimiliki tersebut sudah semestinya Kota Banjarbaru dapat melaksanakan pembangunan dan menyejahterakan masyarakatnya dengan baik. Meski demikian selalu terdapat potensi perbedaan tingkat kesejahteraan yang dicapai oleh masyarakat diberbagai wilayah. Perbedaan ketersediaan (*endowment*) sumber daya yang dimiliki dan metode yang digunakan sebagai pendekatan pembangunan serta faktor-faktor pendukung lainnya bisa menjadi penyebabnya. Karena itu, diperlukan model implementasi yang tepat untuk memastikan kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan dapat berjalan efisien dan efektif. Implementasi yang tepat untuk diterapkan tentulah harus sesuai dengan situasi dan kondisi aktual dan spesifik di daerah.

Salah satu syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan pembangunan secara tepat adalah dengan tersusunnya model perencanaan

yang baik. Hal ini didahului dengan ketepatan analisis atas data dan informasi perekonomian di daerah. Upaya mendorong pembangunan khususnya pembangunan ekonomi tidak lepas dari adanya pengembangan potensi ekonomi masyarakat baik berupa potensi sumberdaya manusia, potensi sumberdaya alam, potensi sumberdaya finansial, maupun sumberdaya kelembagaan ekonomi masyarakat. Empat komponen sumberdaya tersebut jika dikelola dengan baik akan merupakan modal besar yang dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah dengan cepat dan tepat.

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah maka setiap daerah otonom memiliki keleluasaan untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Daerah harus mampu mengembangkan kapasitasnya secara optimal untuk mengembangkan sumberdaya yang dapat dijadikan sebagai andalan dalam pengembangan perekonomian daerah hingga masa yang akan datang.

Penyajian Pemetaan Potensi Perekonomian Kota Banjarbaru ini diharapkan dapat menjadi upaya awal untuk mengembangkan potensi sektor-sektor strategis di Kota Banjarbaru dalam pengembangan potensi daerah yang lebih luas yang akhirnya bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan PAD. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan daya saing daerah sangat relevan dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam UU No.32/2004 tentang Otonomi daerah serta secara khusus amanat RPJPD dan RPJMD Kota Banjarbaru.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan dan Potensi Ekonomi Wilayah

Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertum-

bahan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Tadaro, 2000).

Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan ekonomi tradisional. Beberapa ekonom modern mulai mengedepankan *dethronement of GNP* (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi). Pengetasan garis kemiskinan, pengurangan distribusi pendapatan yang semakin timpang, dan penurunan tingkat pengangguran yang ada. Jelasnya bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang *multidimensional* (Mudrajat, 2003).

Rahardjo Adisasmita (2005), menyatakan bahwa pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas. Hal ini merupakan petunjuk bahwa identifikasi potensi perekonomian akan menemukan sumber yang berdimensi luas.

Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah

Potensi ekonomi suatu daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Soeparmoko, 2002).

Dalam pengembangan wilayah, pengembangan tidak dapat dilakukan serentak pada semua sektor perekonomian akan tetapi diprioritaskan pada pengembangan sektor-sektor perekonomian yang potensi berkembangnya cukup besar. Pertumbuhan yang cepat dari sektor potensial tersebut akan mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya yang pada akhirnya secara tidak langsung sektor perekonomian lainnya akan mengalami perkembangan.

Pengembangan suatu sektor ekonomi potensial dapat menciptakan peluang bagi berkembangnya sektor lain yang terkait, baik sebagai input bagi sektor potensial maupun sebagai imbas dari meningkatnya kebutuhan tenaga kerja sektor potensial yang mengalami peningkatan pendapatan. Hal inilah yang memungkinkan pengembangan sektor potensial di-

lakukan sebagai langkah awal dalam pengembangan perekonomian wilayah dan pengembangan wilayah secara keseluruhan.

Identifikasi Potensi Ekonomi Sektor

1. Teori basis Ekonomi

Dalam perekonomian regional terdapat kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Menurut Glasson (1990) kegiatan-kegiatan Basis (*Basic activities*) adalah kegiatan mengeksport barang-barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis (*Non basic activities*) adalah kegiatan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal didalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan kedalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa sehingga akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengurangi pendapatan suatu daerah dan turunya permintaan terhadap barang dan jasa dan akan menurunkan volume kegiatan (Richardson, 1977). Kegiatan basis mempunyai peranan penggerak pertama (*Prime mover role*) dimana setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian regional. Pendekatan secara tidak langsung mengenai pemisahan antara kegiatan basis dan kegiatan bukan basis dapat menggunakan salah satu ataupun gabungan dari tiga metode yaitu :

- a. Menggunakan asumsi-asumsi atau metode arbitrer sederhana
Megasumsikan bahwa semua industri primer dan manufaktur adalah Basis, dan semua industri Jasa adalah bukan basis, metode tidak memperhitungkan adanya kenyataan bahwa dalam sesuatu kelompok industri bisa terdapat industri-industri yang menghasilkan barang yang sebagian di ekspor atau dijual kepada lokal atau keduanya.
- b. Metode *Location Quotient* (LQ).
Metode *Location Quotient* (LQ) adalah salah satu tehnik pengukuran yang paling terkenal dari model basis ekonomi untuk menentukan sektor basis atau non basis (Prasetyo, 2001 : 41-53; Lincolyn, 1997: 290). Analisis LQ dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi dan pergeseran sektor-sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan wilayah. Dengan dasar pemikiran *economic base* kemampuan suatu sektor

dalam suatu daerah dapat dihitung dari rasio berikut : $LQ = (Lij/Lj) / (Nip/Np)$, dengan keterangan: Lij = Nilai tambah sektor i di daerah j (Kabupaten/Kota), Lj = Total nilai tambah sektor di daerah j, Nip = Nilai tambah sektor i di daerah p (Propinsi/ Nasional), Np = Total nilai tambah sektor di p, P = Propinsi /Nasional, Lij/Lj = Prosentasi employment regional dalam sektor i, Nip/Np = Prosentase employment nasional dalam sektor i, Atau melalui formulasi berikut:

$$LR = \frac{V1R / VR}{V1 / V}$$

Dimana : V1R = Jumlah

PDRB suatu sektor kabupaten / kota, VR = Jumlah PDRB seluruh sektor kabupaten/kota, V1 = Jumlah PDRB suatu sektor tingkat propinsi, V = Jumlah PDRB seluruh sektor tingkat propinsi.

Berdasarkan hasil perhitungan LQ tersebut dapat dianalisis dan disimpulkan sebagai berikut :

- Jika $LQ > 1$, merupakan sektor basis, artinya tingkat spesialisasi Kabupaten / kota tinjauan lebih tinggi dari tingkat propinsi
- Jika $LQ = 1$, berarti tingkat spesialisasi kabupaten / kota sama dengan di tingkat propinsi
- Jika $LQ < 1$, adalah merupakan sektor non basis, yaitu sektor yang tingkat Spesialisasi kabupaten/kota lebih rendah dari tingkat propinsi

c. Metode ketiga, yakni kebutuhan minimum (*minimum requirements*) adalah modifikasi dari metode LQ dengan menggunakan distribusi minimum dari employment yang diperlukan untuk menopang industri regional dan bukannya distribusi rata-rata. Untuk setiap daerah yang pertama dihitung adalah persentase angkatan kerja regional yang dipekerjakan dalam setiap industri. Kemudian persentase itu diperbandingkan dengan perhitungan hal-hal yang bersifat kelainan dan persentase terkecil dipergunakan sebagai ukuran kebutuhan minimum bagi industri tertentu. Persentase minimum ini dipergunakan sebagai batas dan semua employment di daerah-daerah lain yang lebih tinggi dari persentase dipandang sebagai employment basis. Proses ini dapat diulangi untuk setiap industri di daerah bersangkutan untuk memperoleh employmen basis total. Dibandingkan dengan metode LQ, metode ini malahan lebih bersifat arbiter karena sangat tergantung pada pemilihan persentase minimum dan tingkat disagregasi yang terlalu terperinci malahan dapat mengakibatkan hampir semua sektor menjadi kegiatan basis atau ekspor.

2. Analisis shift-share :

Pada dasarnya analisis ini membahas hubungan antara pertumbuhan wilayah dan struktur ekonomi wilayah, untuk mengetahui perubahan struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di daerah dibandingkan dengan perekonomian daerah yang lebih tinggi digunakan analisis *Shift- Share*. Teknik ini menggambarkan *performance* (kinerja) sektor-sektor di suatu wilayah dibandingkan kinerja sektor-sektor perekonomian nasional. Dengan demikian dapat ditemukan adanya *shift* (pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah, bila daerah itu memperoleh kemajuan lebih lambat atau lebih cepat dari kemajuan nasional. Lincolyn Arsyad (1997: 290) dan Latif Adam (1994), mengemukakan bahwa analisis *shift-share* merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Teknik ini membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor di suatu wilayah dengan laju pertumbuhan perekonomian nasional serta sektor-sektornya, dan mengamati penyimpangan-penyimpangan dari perbandingan-perbandingan itu. Bila penyimpangan itu positif, hal itu disebut keunggulan kompetitif dari suatu sektor dalam wilayah tersebut.

3. Tipologi Klassen.

Teknik Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektoral daerah (Widodo, 2006). Masing-masing sektor ekonomi di daerah dapat diklasifikasikan sebagai sektor yang prima, berkembang, potensial, dan terbelakang. Analisis ini mendasarkan pengelompokan setiap sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusinya terhadap total PDRB suatu daerah yang bersangkutan.

Penentuan kategori suatu sektor ke dalam empat kategori di atas dapat digambarkan pada bagan dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Kategori sektor

Kontribusi Rerata Laju Pertumbuhan	Rerata	
	$Y_{\text{sektor}} \geq Y_{\text{PDRB}}$	$Y_{\text{sektor}} < Y_{\text{PDRB}}$
$r_{\text{sektor}} \geq r_{\text{PDRB}}$	Sektor Prima	Sektor berkembang
$r_{\text{sektor}} < r_{\text{PDRB}}$	Sektor Potensial	Sektor Terbelakang

Sumber : Widodo, 2006

Ket:

Y_{sektor} = nilai sektor ke i

Y_{PDRB} = rata-rata PDRB

r_{sektor} = laju pertumbuhan sektor ke-i

r_{PDRB} = laju pertumbuhan PDRB

Penentuan Prioritas Sektor Poensial

Dari hasil analisis LQ dan S-S untuk keunggulan kompetitif dan komparatif/spesialisasi serta Tipologi Klassen yang semuanya diskorakan sesuai dengan range yang ada di masing-masing sektor, maka dapat ditentukan sektor yang diprioritaskan dalam pengembangan sektor potensial di Kota Banjarbaru. Interval kelas mengikuti Tipologi Klassen sedangkan range-nya adalah:

$$R = \frac{\text{Nilai terbesar} - \text{Nilai terkecil}}{\text{Kelas}}$$

(Purbayu dan Ashari, 2003)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Sumberdaya Manusia

Penduduk Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2010 berjumlah 199.627 orang terdiri dari 102.285 laki-laki dan 97.342 perempuan. Mereka tersebar di berbagai kecamatan, yang menurut persentasenya paling besar berada di kecamatan Landasan Ulin, kemudian Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, Liang Anggang, dan Cempaka. Lebih lengkap sebagaimana tabel 2. berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Banjarbaru

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Landasan Ulin	26.514	24.996	51.510
2	Liang Anggang	17.725	16.823	34.548
3	Cempaka	14.645	13.674	28.319
4	Banjarbaru Utara	21.803	21.002	42.805
5	Banjarbaru Selatan	21.598	20.847	42.445
	Total	102.285	97.342	199.627
	Persentase	51,24	48,76	100,00
	2009	86.270	85.226	171.496
	2008	83.735	80.481	164.216
	2007	81.200	78.030	159.230
	2006	78.460	74.695	153.155

Dari penduduk Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2010 berjumlah 199.627 orang terdiri dari 145.250 orang usia kerja (umur 15 tahun ke atas) dan sisanya 54.377 orang usia 0 – 14 tahun. Dari penduduk pada usia kerja tersebut, terdapat sebanyak 94.682 orang merupakan angkatan kerja (TPAK 65,19%) sedangkan yang bukan merupakan angkatan kerja sebanyak 50.558 orang. Dari sejumlah angkatan kerja tersebut, sebanyak 87.013 orang adalah pekerja dan 7.669 orang penganggur (TPT 8,1%). Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Banjarbaru cenderung terus turun meskipun penurunannya bergelak lambat. Keadaan penduduk usia 15 tahun keatas di Kota

Banjarbaru ini dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut.

Tabel 3. Penduduk 15 tahun keatas Menurut Kegiatan Utama di Kota Banjarbaru 2005 - 2010

Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	Jumlah					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Angkatan Kerja	63882	64525	71206	74091	75283	94682
Bukan Angkatan Kerja	43485	60071	58300	59878	62337	50558
Penduduk >15 Tahun	107367	110926	115438	116741	123442	145250
TPAK (%)	59.5	58.17	61.68	63.47	61	65.19
Pekerja	57.890	58.182	64.506	65.541	68.395	87.013
Penganggur	5.992	6.343	6.700	8.550	6.888	7.669
TPT	9.38	9.83	9.41	11.54	9.15	8.1

Penduduk yang bekerja tersebar ke berbagai sektor usaha. Sektor tersier masih merupakan lapangan usaha utama di Kota Banjarbaru (68.57 %) diikuti oleh sektor sekunder (24.09%) dan sektor primer (7.33%). Hal ini sejalan dengan sifat Kota Banjarbaru sebagai daerah yang unggul dalam sektor perdagangan dan jasa perkotaan.

Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja, umur 15 tahun ke atas atau tenaga kerja, baik yang sedang bekerja ataupun mencari pekerjaan. Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja pada 2010 adalah 3.470 orang. Jumlah pencari kerja yang telah ditempatkan pada 2010 adalah 1.203 orang sehingga selisih yang masih tercatat sebagai pencari kerja adalah 2.267 orang.

Potensi Sumberdaya Alam

1. Potensi Penggunaan lahan

Penggunaan lahan di Kota Banjarbaru diatur dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Kota yang meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung Kota Banjarbaru meliputi :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya;
2. Kawasan perlindungan setempat;
3. Kawasan rawan bencana alam.

Kawasan Budidaya beserta luasannya di Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel 4.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Banjarbaru merupakan dokumen perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2009-2029. Adapun luas tanah bukan sawah menurut penggunaan pada tahun 2004-2008 dapat dilihat pada tabel 5.

Penggunaan lahan terluas adalah untuk peruntukan lain-lain, kemudian peruntukan peka-

rangan/lahan untuk bangunan dan halaman dan peruntukan sementara tidak diusahakan.

Tabel 4. Luas Kawasan Budidaya Berdasarkan Peruntukannya

No.	Kawasan Peruntukan	Luas (Ha)
1.	Pertanian	13.519,625
2.	Pertambakan	32,890
3.	Pemukiman	18.223,552
4.	Industri	1.092,125
5.	Parwisata	-
6.	Pertahanan Keamanan	-
7.	Tempat Peribadatan	-
8.	Pendidikan	33,545
9.	Perdagangan/Jasa	958,250
10.	Fusat Pemerintahan Provinsi dan Pendukung	300

Tabel 5. Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Penggunaannya

Lahan	Luas (Ha)				
	2004	2005	2006	2007	2008
Pemukiman/Lahan Cak. Bang.	9.537,00	7.437,00	7.037,00	7.837,00	7.837,00
Tanaman Perkebunan	3.012,00	3.614,00	3.014,00	3.007,00	3.007,00
Perikanan	253,20	395,20	353,20	385,20	395,20
Sementara Tidak Dimanfaatkan	6.093,60	6.336,60	6.196,60	6.206,60	6.206,60
Perak. Rakyat	315,00	315,00	315,00	335,00	335,00
Perak. Pegawai	326,00	326,00	326,00	326,00	326,00
Perkebunan	780,00	780,25	780,25	487,25	487,25
Perdagangan	1.562,00	1.662,00	1.662,00	1.482,00	1.482,00
Tempat/Tempat	200,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Lain-Lain	11.812,00	11.744,05	11.566,95	12.134,05	12.134,05
Rata-Rata	33.475,00	33.337,70	33.486,00	33.902,10	33.902,10

2. Potensi Komoditas Pertanian

a. Potensi Tanaman Pangan dan Holtikultura

Sub sektor tanaman pangan merupakan salah satu sub sektor pada sektor pertanian. Sub sektor ini mencakup tanaman padi (Padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau.

Lahan yang sudah dimanfaatkan untuk tanaman padi sawah pada tahun 2010 adalah seluas 4.225 ha. Sedangkan lahan sawah yang sementara tidak digunakan berjumlah 52 Ha. Wilayah potensial tanaman padi sawah berproduksi 58.136,85 ton atau rata-rata produksi 237,58 Kw/ha.

Lahan tanam untuk padi ladang adalah seluas 2.532 ha, dengan rata produksi 237,58 kw per hektar.

b. Potensi Perikanan

Potensi perikanan Kota Banjarbaru sangat menonjol di Kalimantan Selatan, khususnya da-

lam hal perikanan darat. Tercatat produksi ikan dihasilkan diberbagai tempat, seperti kolam, jaring, karamba, dan sawah. Produksi ikan cenderung meningkat meskipun terdapat fluktuasi akibat pengaruh perubahan musim dan fenomena alam. Jumlah produksi tahun 2010 pada tempat produksi kolam mencapai 210 ton sebelumnya pada 2009 mencapai 961,80 ton. Tempat produksi jaring apung menghasilkan 18.450 ton dan karamba menghasilkan 162.534 ton. Potensi perikanan berdasarkan luas areal di Banjarbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Luas Areal Potensi Perikanan Kota Banjarbaru Menurut Kecamatan, 2010

Kecamatan	Jenis Areal (Ha)				
	Sungai	Danau	Kolam	Karamba (M2)	Sawah
Landasan Ulin	5	12	11	900	7
Liang Anggang	20,5	10	15	800	1
Cempaka	90	16	29	2.600	37
Banjarbaru Utara	3	0	47	0	5
Banjarbaru Selatan	12	3	8	0	2
Jumlah	130,5	41	110	4.300	52

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Banjarbaru 2009

Berdasarkan data pada tabel diatas daerah-daerah yang menjadi potensi utama perikanan tersebut diberbagai kecamatan dengan masing-masing keunggulan yang berbeda. Areal perikanan sungai yang terbesar di Liang Anggang sedangkan areal kolam terluas di Banjarbaru Utara. Sementara itu untuk karamba dan sawah, dikuasai Kecamatan Cempaka.

c. Potensi Perkebunan

Komoditas perkebunan yang diusahakan sampai saat ini di Kota Banjarbaru meliputi karet, kelapa dalam, Kelapa hybrida, kopi, melinjo, kencur, dan lain-lain. Areal terluas perkebunan di tempati oleh Karet kemudian diikuti kelapa dalam.

Lahan kering di Kota Banjarbaru cocok untuk tanaman perkebunan. Lahan yang sudah dimanfaatkan untuk perkebunan pada tahun 2010 sebesar 987 ha. Dari jumlah luasan tersebut areal perkebunan didominasi oleh karet dengan 577 Ha disusul oleh kelapa dalam dengan 208 Ha.

Sebagai wilayah yang memiliki luas terkecil, potensi lahan memang bukan menjadi faktor keuntungan bagi Kota Banjarbaru. Akan tetapi jika budidaya komoditas dapat dilakukan dengan lebih intensif dan produktif dapat menjadi sumberdaya yang berarti bagi perrekonomian.

Tabel 7. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Menurut Jenisnya Tahun 2010

Jenis Tanaman	Luas (Ha)	Produksi	Satuan Produksi
01. Karet	577	2.678	Kw
02. Kelapa Dalam	208	1.171.406	Butir
03. Kelapa Hibrida	38	213.750	Butir
04. Kelapa Sawit	105	t.a	
05. Kopi	16	32	Kw
06. Melinjo	29	57.600	Kg
07. Kencur	7	520	Kw
08. Cengkeh	7	t.a	

Sumber: Kota Banjarbaru Dalam Angka, BPS, 2011

d. Potensi Peternakan

Secara umum potensi peternakan di Kota Banjarbaru terdiri dari ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Populasi ternak besar tahun 2010 yang terdiri dari sapi 5.003 ekor, kerbau 11 ekor, kambing 7.876 ekor, dan babi 700 ekor. Kemudian ternak unggas seperti ayam buras 370.750 ekor, ayam broiler 2.167.860, dan ayam petelur 41.861 ekor. Nampak bahwa secara relatif ternak besar kurang berkembang di Kota Banjarbaru dibanding daerah-daerah lain yang lebih luas seperti di Tapin. Meskipun demikian populasi ternak unggas nampak telah berkembang dengan baik. Jumlah populasi tersebut tersebar di 5 kecamatan sebagaimana tabel 8. berikut

Tabel 8. Populasi ternak Unggas Menurut Kecamatan Kota Banjarbaru 2010

Kecamatan	Ayam Buras	Ayam Potong	Ayam Petelur	Puyuh	Angsa	Itik	Jumlah
Landasan Ulin	73000	1142757	5000	-	800	5110	1226667
Liang Anggang	11000	341217	-	8900	30	6440	466587
Cempaka	52000	66000	36861	3270	50	1500	158681
Banjarbaru Utara	75000	210000	-	5906	150	4124	295180
Banjarbaru Selatan	60750	408886	-	1722	200	2700	474258
Jumlah	370750	2167860	41861	19798	1230	19874	2621372

Sumber: Kota Banjarbaru Dalam Angka, BPS, 2011

Potensi Perindustrian

Terdapat kecenderungan yang positif dalam perkembangan sektor industri. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya jumlah unit usaha industri sampai dengan 2010. Jumlah Perusahaan

an Besar tahun 2006 hanya sebanyak 5 unit. Pada 2010 jumlah tersebut naik menjadi 6 industri besar. Sebagian besar industri berpusat di Liang Anggang.

Tabel 9. Jumlah Perusahaan Industri Menurut Kelompok Tenaga Kerja Tahun 2010

Kecamatan	Besar	Sedang	Kecil	R.Tangga	Jumlah
	>100	20 - 99	5 - 19	1 - 4	
1. Landasan Ulin	1	14	83	168	266
2. Liang Anggang	5	24	24	166	286
3. Cempaka	0	3	14	94	111
4. Banjarbaru utara	0	6	47	162	215
5. Banjarbaru Selatan	0	7	56	165	228
Jumlah	6	54	291	755	1106
2009	4	39	263	702	1008
2008	5	47	231	574	857
2007	5	55	215	493	768
2006	5	50	201	434	690
2005	5	48	170	376	599
2004	5	45	139	346	535

Kelompok industri Sedang juga meningkat jumlahnya dimana pada tahun 2004 hanya 45 buah telah menjadi 54 pada 2010. Kenaikan yang sangat nyata terjadi pada industri kecil dan rumah tangga. Industri kecil pada tahun 2004 berjumlah 139 buah menjadi 291 buah pada 2010. Industri Rumah Tangga juga terus meningkat dari 346 buah di tahun 2004 menjadi 755 buah pada 2010. Keseluruhan unit industri pada 2010 berjumlah 1.106 unit.

Nampak dari sebaran unit industri di seluruh kecamatan tidak terjadi konsentrasi ataupun ketimpangan antara satu dan lainnya. Kendati Liang Anggang lebih banyak menampung industri besar dan sedang namun di kecamatan-kecamatan lain juga terdapat sejumlah unit usaha industri yang beroperasi umumnya dalam skala kecil dan rumah tangga.

Potensi Usaha Perdagangan dan Koperasi

Terdapat 5.960 pengusaha kecil baik formal maupun non formal yang beroperasi di Kota Banjarbaru pada 2010. Umumnya pengusaha kecil tersebut bergerak di sektor perdagangan. Tenaga kerja yang terserap kedalam usaha kecil tersebut seluruhnya berjumlah 11.539 orang, baik yang berstatus tenaga tetap, tenaga lempa, dan keluarga.

Bergeraknya sektor perdagangan juga dapat dilihat dari jumlah perusahaan pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dari tahun 2005 sampai dengan 2010 jumlah perusahaan pemegang SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) kategori pedagang besar terus meningkat. Perkembangan pesat terjadi secara merata disemua kecamatan dengan rata-rata peningkatan 84,38%. Sedangkan perkembangan paling lambat ada pada Kecamatan Cempaka dengan peningkatan sebesar 69.23 %. Meski demikian secara keseluruhan sektor perdagangan telah maju pesat.

Tabel 9. Jumlah KUD dan Non KUD Serta Anggotanya (dalam Ribuan) Tahun 2010

Kecamatan	Koperasi	Anggota	Simpanan
01. Landasan Ulin	19	2,491	1,639,105
02. Liang Anggang	13	1,190	14,550,
03. Cempaka	14	1,980	300,662,
04. Banjarbaru Utara	55	5,647	2,173,130
05. Banjarbaru Selatan	43	4,558	1,436,954
TOTAL	144	15,866	5,564,401
2009	142	15,650	5,000,877
2008	-	-	-
2007	130	15,257	13,066,433
2006	138	13,190	6,511,027

Koperasi adalah badan yang dapat berfungsi sebagai bagian dari fasilitasi pengembangan usaha masyarakat. Perkembangan koperasi di Kota Banjarbaru dari tahun ketahun cukup positif. Pada 2010 jumlah koperasi baik KUD maupun Non KUD telah berjumlah 144 unit dimana pada 2006 hanya berjumlah 138 unit.

Perkembangan anggota koperasi juga terlihat signifikan karena telah bertambah dari 13.190 orang pada 2006 menjadi 15.866 orang pada 2010. Jumlah koperasi terbanyak ada pada Kecamatan Banjarbaru Utara yang disusul tidak jauh oleh Banjarbaru Selatan.

Potensi Sumberdaya Keuangan

Sumberdaya keuangan meliputi sumber-sumber dana yang bisa diakses masyarakat untuk kegiatan usaha produktif. Dana yang tersedia berasal dari dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan bank dan non bank untuk disalurkan kembali kepada nasabah yang melakukan investasi ataupun pengeluaran-pengeluaran lainnya. Dana pihak ke tiga ini akan merupakan potensi besar untuk investasi di Kota Banjarbaru. Melalui investasi masyarakat akan mulai menjalankan usahanya yang pada akhirnya berdampak kepada tingginya pertumbuhan perekonomian Kota Banjarbaru.

Perkembangan sector keuangan di Kota Banjarbaru telah lama menunjukkan perkem-

bangun yang menggembirakan. Di daerah ini sudah terdapat berbagai Bank umum pemerintah maupun swasta yang beroperasi, seperti Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan, Bank Mega, Bank BCA, dan lain-lain. Selain lembaga perbankan, juga terdapat banyak lembaga keuangan bukan perbankan seperti BMT, Koperasi, dan lembaga-lembaga pembiayaan.

Sumberdaya Infrastruktur Pendukung

Infrastruktur atau prasarana dapat diartikan sebagai segala fasilitas fisik yang dibutuhkan bagi berlangsungnya suatu kegiatan pokok (*core*) yang memiliki struktur tertentu. Sedikitnya terdapat dua macam dalam pembagian infrastruktur, yakni infrastruktur ekonomi atau komersial dan infrastruktur sosial.

Infrastruktur pendukung aktifitas penanaman modal meliputi infrastruktur energi, transportasi & komunikasi, dan pasar /distribusi. Dengan tersedianya infrastruktur ini akan memungkinkan bagi dibangunnya struktur kegiatan ekonomi seperti di bidang industri, pertanian, pertambangan, jasa, dan lain-lain.

Tabel 10. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Dirinci Setiap Kecamatan Tahun 2010

Kecamatan	Aspal	Batu	Kerikil	Tanah	JIH
01. Landasan Ulin	110,717	-	-	14,104	124,821
02. Liang Anggang	57,810	3,611	-	7,935	69,356
03. Cempaka	101,138	4,034	-	19,796	124,968
04. Banjarbaru Utara	89,305	-	-	5,865	100,860
05. Banjarbaru Selatan	86,249	-	-	14,611	95,170
TOTAL	445,219	7,645	-	62,311	515,175
2009	428,839	8,278	-	78,057	905,529
2008	392,743	32,807	-	89,625	1,741,702
2007	356,433	24,878	-	132,309	513,620
2006	345,145	19,760	-	148,715	513,620

Dari segi kualitas terlihat infrastruktur jalan yang ada di Kota Banjarbaru terus meningkat. Sepanjang tahun 2006 sampai dengan 2010 jalan tanah terus berkurang panjangnya, sebaliknya jalan dengan permukaan aspal semakin bertambah panjangnya.

Hal ini menunjukkan dukungan infrastruktur jalan bagi perkembangan ekonomi dan pengembangan potensi cukup tinggi. Dengan sema-

kin memadai dan berkualitasnya jalan maka kebutuhan transportasi untuk mobilisasi barang modal maupun barang konsumsi semakin lancar.

Infrastruktur sosial yang dapat mendukung pengembangan sumberdaya ekonomi, khususnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah sekolah.

Tabel 11. Jumlah Sekolah Negeri di Kota Banjarbaru, 2010

No	Kecamatan	SD	SLTP	SMA
1	Landasan Ulin	14	2	0
2	Liang Anggang	6	2	1
3	Cempaka	16	4	1
4	Banjarbaru Utara	19	4	1
5	Banjarbaru Selatan	14	2	1
	Total	69	14	4

4. PENUTUP

Kesimpulan

Untuk mengembangkan potensi sektor-sektor strategis di Kota Banjarbaru dalam pengembangan potensi daerah yang lebih luas yang akhirnya bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan PAD, ditengah keterbatasan SDA namun letak geografis yang strategis Banjarbaru hingga potensi-potensi yang dimiliki harus benar-benar dimanfaatkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anonim; (2003), *Modul Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Nasional*. Bappenas, Jakarta.
- Anonim, (2006), *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2006-2010*, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- Anonim, (2001), *Rencana Strategis Visi dan Misi 2001-2005*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kota Banjarbaru, Banjarbaru.
- Anonim, (2000), *Pendapatan Regional Kota Banjarbaru 2000-2010*, BPS Banjarbaru.
- Anonim, (2006), *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Kalimantan Selatan, 2006-2007* (beberapa edisi), Bank Indonesia Banjarmasin.
- Anonim, (2001), *Kota Banjarbaru Dalam Angka 2001*, BPS Banjarbaru.
- Anonim, (2002), *Kota Banjarbaru Dalam Angka 2002*, BPS Banjarbaru,
- Anonim, (2003), *Kota Banjarbaru Dalam Angka 2003*, Banjarbaru BPS Banjarbaru,
- Anonim, (2004), *Kota Banjarbaru Dalam Angka 2004*, BPS Banjarbaru
- Anonim, (2005), *Kota Banjarbaru Dalam Angka 2005*, BPS Banjarbaru
- Anonim, (2006), *Kota Banjarbaru Dalam Angka 2006*, BPS Banjarbaru
- Anonim, (2008), *Kota Banjarbaru Dalam Angka 2007*, BPS Banjarbaru
- Anonim, (2009), *Kota Banjarbaru Dalam Angka 2008*, BPS Banjarbaru
- Anonim, (2010), *Kota Banjarbaru Dalam Angka 2008*, BPS Banjarbaru
- Anonim, (2008), *Monografi Kabupaten 2008*, BPS Banjarbaru,
- Anonim, (2004), *Keadaan Angkatan Kerja di Banjarbaru, 2004*, BPS Tabalong,
- Anonim, (2007), *Keadaan Angkatan Kerja di Banjarbaru 2007*, BPS Banjarbaru
- Anonim, (2004), *Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kalsel 2003*, BPS Kalsel
- Anonim, (2000-2007), *Pendapatan Regional Kabupaten Banjarbaru 2000-2007*, BPS Banjarbaru
- Arsyad, Lincolyn; (1999), *Pengantar Perencanaan Ekonomi Daerah*. BPFU-UGM, Jogjakarta.
- Anonim, (2007), *Potensi dan Peluang Investasi di Kalimantan Selatan*, Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
- Anonim, (2005), *Laporan Tahunan Badan Tahun 2004*, BKPM dan KAPET Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
- Anonim, (2007), *Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 2007*, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- Anonim, (2007), *Undang Undang Penanaman Modal No 25 Tahun 2007*, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta
- Tarigan, Robinson. (2004), *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara, Jakarta
- Todaro, Michael P., (1986), *Perencanaan Pembangunan: Model dan Metode*, Jakarta: CV Intermedia.